

KINERJA APARATUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

PERFORMANCE OF THE ENVIRONMENTAL AGENCY (DLH) STAFF IN THE IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT REGULATIONS IN INDONESIA

Nikita Judithya Andini¹, Yunita², Fitriana Selvia³

^{1,2,3} Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Indonesia

E-mail: nichiartdesign@gmail.com, yunitaayie20@gmail.com, Selviaf@fisip.upr.ac.id

Abstrak: Kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam implementasi regulasi pengelolaan sampah di Indonesia pada periode 2023–2024. Fokus penelitian diarahkan pada dasar kelembagaan, kewenangan, serta peran strategis DLH dalam menjalankan kebijakan nasional maupun daerah guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang efektif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan kinerja pemerintah, dan dokumen regulasi terkait pengelolaan sampah. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih belum optimal dan cenderung tidak merata antar daerah. Beberapa wilayah menunjukkan kemajuan melalui dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, sementara wilayah lain menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas teknis, lemahnya akuntabilitas, rendahnya kapasitas aparatur, serta minimnya kesadaran publik. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan tertulis dengan pelaksanaan di lapangan yang dipengaruhi oleh kompetensi SDM dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, modernisasi sarana teknis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan transparansi digital sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja DLH menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: *Dinas Lingkungan Hidup, kinerja aparatur, pengelolaan sampah.*

Abstract: *The performance of the Environmental Agency (DLH) in implementing waste management regulations in Indonesia during the 2023–2024 period. The study aims to analyze the institutional foundations, authority, and strategic role of DLH in ensuring the effectiveness of waste management policies at the regional level. Using a qualitative approach through a literature study, this research synthesizes various secondary sources, including scientific journals, government performance reports, and regulatory documents. The findings indicate that the implementation of waste management policies remains suboptimal and varies significantly across regions. Some areas have achieved positive outcomes supported by adequate budgeting, cross-sectoral coordination, and community participation, while others face challenges such as limited technical facilities, low staff capacity, weak accountability, and minimal public awareness. Furthermore, discrepancies between written regulations and field implementation are influenced by human resource competence and the effectiveness of supervision. This study highlights the need for institutional strengthening, capacity-building for DLH staff, modernization of technical facilities, and the application of digital transparency as strategic efforts to enhance DLH performance and promote sustainable waste management.*

Keywords: *Environmental Agency, apparatus performance, waste management.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat, jumlah timbulan sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023.), Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dengan komposisi terbesar berasal dari sisa makanan dan plastik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani secara sistematis dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup.

Penelitian mengenai pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi tantangan kompleks di tingkat kota. Pengelolaan sampah plastik di kota-kota besar masih menghadapi kendala serius akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya infrastruktur pendukung daur ulang (Aromi, 2024). Pendekatan partisipatif masyarakat dianggap penting untuk mendorong solusi yang lebih berkelanjutan dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Selain itu, kompleksitas permasalahan sampah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas pengolahan, tetapi juga lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah serta perilaku konsumtif masyarakat (Lingga dkk., 2024). Hal tersebut sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah dapat dijadikan indikator kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi lingkungan hidup secara optimal (Toif Fadzoli dkk., 2023)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional. Landasan hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), yang menargetkan pengurangan 30% dan penanganan 70% sampah pada tahun 2025 (*Perpres Nomor 97 Tahun 2017, 2017.; PP Nomor 81 Tahun 2012, 2012.; UU Nomor 18 Tahun 2008, 2008.*). Selain itu, Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 menegaskan tanggung jawab produsen melalui penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) untuk mengurangi sampah dari sumbernya (Silahudin, dkk, 2022). Seluruh kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip good environmental governance guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan (Hasriani, 2024)

Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berjalan efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup Daerah, DLH berfungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, serta kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan peningkatan partisipasi masyarakat (*Permendagri, 2019*). Dengan demikian, DLH merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Menurut Prawirosentono (2012: 2) dalam (Putra & Wediyanto, 2023) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi



bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Kemudian (Utari & Mulyanti, 2023) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seorang pekerja dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, kesungguhan, dan waktu. Kinerja terdiri dari tiga komponen penting: kemampuan dan minat pekerja, penerimaan penjelasan tugas dan peran, dan tingkat motivasi pekerja.

Menurut (Anjasmari & Nor'aini, 2023) kinerja adalah suatu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dicapainya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Kemudian (Agustina & Daroini, 2025) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang berhasil dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai kriteria atau standar kerja yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan karena pentingnya memahami dasar peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagai lembaga pelaksana di tingkat daerah, DLH memegang peranan sentral dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan publik dan kinerja birokrasi lingkungan hidup, khususnya dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lapkin Ditjen Bina Adwil*, 2022).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar kelembagaan, kewenangan, dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia pada

periode 2023–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, melalui analisis terhadap berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan kinerja pemerintah, serta dokumen regulasi yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kerangka kebijakan, struktur organisasi, dan konteks administratif yang melandasi peran DLH sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan lingkungan di daerah.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa penelitian dilakukan atas dasar kebutuhan akademik dan praktis untuk memahami posisi strategis Dinas Lingkungan Hidup dalam sistem tata kelola lingkungan nasional. Bagian selanjutnya akan menguraikan metode penelitian yang digunakan, hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh DLH, serta kesimpulan yang merangkum kontribusi penelitian terhadap pengembangan kebijakan publik dan praktik pemerintahan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut (Ambarwati, 2022) Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang sistematis yang bertujuan untuk mempelajari fenomena dan bagian-bagiannya, serta hubungannya satu sama lain.. Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Sugiyono, 2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur (library research). Data diambil

dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi dari pemerintah dan artikel penelitian yang spesifik membahas terkait pengelolaan sampah dan kinerja dari aparatur dinas terkait.

Dalam pengumpulan data ini melibatkan pemilihan dan penelusuran berbagai literatur berdasarkan kriteria yang relevan dan kredibel. Penelitian ini akan menganalisis data dengan teknik membaca, memahami, dan mengelompokkan informasi yang didapat untuk menganalisis bagaimana kinerja aparatur dalam implementasi regulasi pengelolaan sampah. Hasil dari kinerja aparatur akan dikaitkan kembali dengan teori-teori yang relevan untuk menghasilkan temuan kajian baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Kinerja Dan Produktivitas

Kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di berbagai daerah di Indonesia selama periode 2023–2024 menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa daerah mencatat peningkatan kinerja, sementara daerah lain masih berhadapan dengan hambatan teknis dan manajerial yang cukup serius. Penelitian Gazalin & Asiri (2023) di Kabupaten Buton menggambarkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan sampah belum sejalan dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Proses pengangkutan yang tidak terjadwal dengan baik serta keterbatasan armada dan peralatan menyebabkan target volume pengangkutan tidak tercapai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa produktivitas kerja aparatur masih rendah dan efisiensi belum terwujud secara maksimal.

Temuan yang sama juga dijelaskan oleh Aryana (2023) di Kota Tanjungpinang, di mana penerapan kebijakan retribusi pelayanan persampahan belum mampu memberikan hasil yang optimal. Capaian penerimaan retribusi hanya sekitar separuh

dari target yang telah ditetapkan. Keterbatasan tenaga kerja yang kompeten, lemahnya komunikasi antar lembaga pelaksana, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya hasil tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa koordinasi yang kuat dan dukungan sumber daya manusia yang memadai, pelaksanaan kebijakan publik sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Berbeda dengan daerah-daerah tersebut, Novitasari & Nurharjadmo (2023) menunjukkan hasil yang cukup positif di Kabupaten Sukoharjo. DLH setempat mampu melebihi target kinerja, yaitu berhasil menangani 47,01% dari target 35% dan menurunkan jumlah timbulan sampah hingga 19,76% dari target 22%. Keberhasilan ini dicapai berkat adanya kerja sama yang baik antarinstansi pemerintah daerah, dukungan anggaran melalui APBD dan DAK, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam program Bank Sampah. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci peningkatan efektivitas pengelolaan sampah di daerah.

Sementara itu, penelitian Utama & Andry (2024) di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa meskipun struktur kelembagaan DLH sudah terbentuk dengan baik, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya pengawasan terhadap pembuangan sampah ilegal dan keterbatasan jumlah armada. Pengawasan yang tidak konsisten menyebabkan implementasi pengelolaan sampah tidak berjalan optimal dan menurunkan kualitas layanan lingkungan (Rahmawati et al., 2023). Demikian pula di Kota Medan, Kembaren & Ridwan (2024) menemukan bahwa peningkatan volume sampah yang

mencapai lebih dari 2.000 ton per hari tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dan sarana pengangkutan yang memadai. Akibatnya, tingkat produktivitas aparatur menurun dan kebersihan kota belum sesuai dengan standar pelayanan publik.

Di wilayah lain, seperti Kota Gorontalo, Ngabito, dkk. (2024) menegaskan bahwa kinerja DLH masih lemah akibat minimnya pelatihan pegawai serta keterbatasan armada operasional. Sedangkan Bachri (2024) di Kabupaten Bone menyoroti bahwa program pengelolaan sampah telah berjalan, seperti pemilahan, pembuatan kompos, dan bank sampah, tetapi efektivitasnya belum optimal karena partisipasi masyarakat masih rendah.

Kota Bekasi menjadi contoh daerah dengan inovasi signifikan. Menurut Simanjuntak (2024), pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pengelolaan sampah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Sumur Batu. Namun, hambatan teknis seperti kerusakan 41 dari 171 truk pengangkut dan kelebihan kapasitas di TPA menjadi tantangan utama. Walau demikian, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi modern berbasis energi.

Secara keseluruhan, kinerja DLH di Indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, efektivitas kebijakan lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat. Daerah yang memiliki sinergi kuat antara pemerintah dan warga cenderung menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan daerah yang masih terfokus pada aspek administratif semata.

Tabel 1. Perbandingan Kinerja DLH di Beberapa Daerah di Indonesia (2023–2024)

Daerah	Capaian Kinerja	Hambatan Utama	Faktor Pendukung
Kabupaten Buton	Program tidak sesuai SOP; produktivitas rendah	Armada minim; pelatihan pegawai kurang	Inisiatif lokal mulai berjalan
Kota Tanjungpinang	Retribusi hanya ±50% dari target	SDM terbatas; koordinasi lemah	Tersedia dasar regulasi retribusi
Kabupaten Sukoharjo	Target terlampaui; pengurangan sampah signifikan	Ketergantungan pada partisipasi publik	Koordinasi kuat; dukungan APBD & DAK; Bank Sampah
Kota Bekasi	Respon cepat (aduan 100%); inovasi PLTSa	41 dari 171 truk rusak; TPA overload	Sistem aduan digital; komitmen inovasi

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Kualitas Pelayanan & Responsivitas

Kualitas pelayanan publik di bidang kebersihan menjadi indikator utama dalam menilai profesionalisme aparatur serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan temuan Gazalin & Asiri (2023), pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Buton masih belum maksimal karena belum adanya sistem pengaduan publik yang efektif serta jadwal pengangkutan yang tidak pasti. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena banyak keluhan yang tidak segera ditindaklanjuti.

Kondisi serupa ditemukan oleh Aryana (2023) di Kota Tanjungpinang, di mana keterlambatan pengangkutan dan kurangnya armada menyebabkan pelayanan seringkali tidak sesuai jadwal. Namun, penelitian Aini & Prasetyo (2024) di Kota Surakarta menunjukkan perbaikan yang signifikan. DLH Surakarta berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dan responsivitas melalui penerapan sistem komunikasi publik berbasis media sosial.



Warga dapat langsung menyampaikan keluhan dan masukan, sementara DLH menanggapi secara terbuka dan cepat. Pendekatan partisipatif ini terbukti efektif membangun kepercayaan publik serta mendorong kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kebersihan kota.

Selaras dengan itu, Simanjuntak (2024) juga mencatat bahwa DLH Kota Bekasi berhasil menumbuhkan kepercayaan publik melalui penerapan layanan pengaduan daring berbasis WhatsApp dan media sosial. Sistem ini memungkinkan pengaduan masyarakat direspon dengan cepat dan tingkat penyelesaian mencapai 100%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya bergantung pada jumlah pegawai atau armada, tetapi juga pada sistem komunikasi yang transparan dan responsif.

Dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik akan meningkat apabila didukung oleh kejelasan informasi, kemudahan akses komunikasi, serta kesediaan aparatur untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara aktif.

Akuntabilitas & Transparansi

Aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi pondasi penting dalam pengelolaan kebijakan publik yang baik. Berdasarkan penelitian Gazalin & Asiri (2023), DLH Kabupaten Buton belum menerapkan sistem pelaporan publik secara terbuka dan audit internal masih jarang dilakukan. Hal ini berdampak pada kurangnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran. Kondisi yang sama ditemukan oleh Aryana (2023) di Kota Tanjungpinang, di mana laporan keuangan retribusi disusun tetapi tidak dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan keraguan terhadap transparansi lembaga.

Sebaliknya, Simanjuntak (2024) melaporkan adanya langkah maju di Kota Bekasi. DLH setempat telah menyusun laporan kinerja tahunan yang berisi realisasi anggaran, indikator keberhasilan, dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Walau sistem digitalnya belum sepenuhnya terbuka, langkah tersebut merupakan wujud dari peningkatan akuntabilitas internal. Sementara itu, Ngabito, dkk. (2024) menunjukkan bahwa DLH Gorontalo telah berupaya menegakkan akuntabilitas dengan memperkuat koordinasi antar bidang, namun publikasi data secara daring masih minim.

Temuan ini menegaskan bahwa sebagian besar instansi lingkungan di Indonesia masih berfokus pada akuntabilitas administratif daripada transparansi publik. Padahal, pelaporan berbasis digital dan keterbukaan informasi dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan publik.

Kapasitas Organisasi & SDM

Kapasitas organisasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Gazalin & Asiri (2023) mencatat bahwa pegawai DLH Kabupaten Buton masih belum mendapatkan pelatihan teknis yang memadai sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas. Rochaeni (2023) juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Bandung masih ditemukan lemahnya koordinasi antar bidang dan ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dengan beban kerja yang ada.

Penelitian Simanjuntak (2024) memberikan gambaran yang lebih spesifik.



Dari total 2.005 pegawai DLH Kota Bekasi, sekitar 89% berpendidikan menengah ke bawah, sedangkan yang berpendidikan sarjana hanya empat orang. Kesenjangan kompetensi ini berdampak langsung pada kemampuan analisis kebijakan, penguasaan teknologi, serta efektivitas manajerial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta penerapan evaluasi periodik menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk memperkuat kinerja lembaga.

Organisasi yang memiliki SDM terampil, struktur yang efisien, serta mekanisme kerja yang adaptif akan mampu mengimplementasikan kebijakan dengan lebih konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan keharusan strategis dalam mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Sarana & Prasarana Teknis

Ketersediaan sarana dan prasarana teknis merupakan komponen vital dalam menentukan efektivitas pengelolaan sampah. Simanjuntak (2024) menemukan bahwa TPA Sumur Batu di Kota Bekasi telah mengalami kelebihan kapasitas akibat peningkatan volume sampah yang tidak sebanding dengan kemampuan armada pengangkut. Dari 171 dump truck yang dimiliki DLH, sebanyak 41 unit mengalami kerusakan berat, bahkan beberapa di antaranya tidak lagi layak digunakan. Kondisi ini memperburuk sistem pengangkutan dan menyebabkan penumpukan sampah di area publik.

Situasi serupa juga ditemukan oleh Kembaren & Ridwan (2024) di Kota Medan dan Ngabito, dkk. (2024) di Kota Gorontalo, di mana keterbatasan fasilitas

teknis seperti TPS, truk, dan peralatan daur ulang menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Sebaliknya, Bachri (2024) menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone, penyediaan fasilitas seperti bank sampah dan tempat pengomposan mampu membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Hasil tersebut menegaskan bahwa modernisasi sarana teknis serta pemeliharaan rutin menjadi faktor penting agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan berkelanjutan dan efisien.

Partisipasi Masyarakat & Perilaku

Partisipasi masyarakat menjadi aspek sosial yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pengelolaan sampah. Gazalin & Asiri (2023) mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat di Kabupaten Buton dalam memilah dan mengelola sampah masih rendah. Hal serupa ditemukan oleh Aryana (2023) di Tanjungpinang, di mana masyarakat masih kurang disiplin dalam membayar retribusi dan sering membuang sampah sembarangan.

Sebaliknya, Novitasari & Nurharjadmo (2023) serta Aini & Prasetio (2024) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat melalui kegiatan edukatif seperti pembentukan Bank Sampah, kampanye lingkungan, dan pelatihan daur ulang mampu meningkatkan kesadaran warga. Program semacam ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab sosial terhadap kebersihan lingkungan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan lingkungan.

Pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan masyarakat agar muncul rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kebersihan kota.

Hambatan & Strategi Peningkatan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia cenderung serupa. Faktor yang paling sering muncul antara lain keterbatasan anggaran, minimnya armada dan fasilitas, rendahnya kapasitas aparatur, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan eksternal yang memperlambat efektivitas kebijakan. Ketidakselarasan antara regulasi dan praktik lapangan menjadi faktor utama lemahnya efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di daerah (Novalita et al., 2018).

Sejumlah strategi telah diterapkan oleh berbagai daerah untuk mengatasi persoalan tersebut. Berdasarkan penelitian Bachri (2024) dan Simanjuntak (2024), upaya yang dilakukan meliputi penguatan peraturan daerah, pelatihan aparatur secara berkala, pengembangan sistem pelaporan digital, pendirian bank sampah berbasis komunitas, serta penerapan teknologi ramah lingkungan seperti PLTSa. Namun, sebagian besar strategi ini masih bersifat lokal dan belum terintegrasi secara nasional.

Oleh karena itu, agar kebijakan pengelolaan sampah dapat dijalankan secara efisien, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi lingkungan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat membutuhkan pendekatan yang lebih bekerja sama dan kreatif.

SIMPULAN

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa performa aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam implementasi regulasi pengelolaan sampah menunjukkan disparitas signifikan antar wilayah di Indonesia. Disparitas tersebut

tidak hanya mencerminkan variasi kapasitas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan perbedaan tingkat komitmen pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan kerangka hukum yang tersedia. Kinerja yang tidak merata menggambarkan adanya kesenjangan implementasi antara kebijakan yang dirancang secara normatif dan praktik administratif di lapangan. Selain itu, temuan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah masih berfokus pada pendekatan administratif, bukan pada strategi pengelolaan berbasis kinerja. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi sistematis untuk memahami faktor-faktor determinan dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peta kinerja aparatur DLH menjadi penting sebagai dasar penilaian kapasitas institusional.

Regulasi nasional yang mengatur sistem persampahan telah memberikan arahan normatif yang jelas, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan implementasi di level daerah. Kerangka hukum yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, dan tata kelola belum secara konsisten diterjemahkan menjadi program operasional yang terukur. Variasi implementasi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan kapasitas daerah dalam menindaklanjutinya. Selain itu, batasan kelembagaan sering membatasi ruang gerak DLH dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi di tingkat masyarakat. Perbedaan dalam prioritas pembangunan daerah juga turut memengaruhi derajat komitmen terhadap program lingkungan. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan lintas level pemerintahan menjadi krusial dalam meningkatkan efektivitas kebijakan.

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih menjadi determinan utama dalam pencapaian hasil implementasi regulasi. Ketidakcukupan armada pengangkutan, fasilitas pengolahan, serta sarana pemilahan sampah menyebabkan banyak daerah tidak dapat memenuhi



standar pelayanan minimal. Ketergantungan pada fasilitas konvensional seperti TPA terbuka menunjukkan lemahnya modernisasi pengelolaan sampah. Keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya memperlambat respons teknis, tetapi juga menurunkan efektivitas operasional aparatur. Selain itu, kurangnya pemeliharaan rutin membuat kapasitas sarpras semakin menurun dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, investasi infrastruktur menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan yang berkelanjutan.

Kapabilitas aparatur menjadi faktor penentu dalam kualitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Rendahnya keterampilan teknis, kompetensi analitis, dan pemahaman regulatif membuat banyak aparatur kesulitan menerapkan kebijakan secara efektif. Kurangnya program pelatihan berkelanjutan menyebabkan aparatur kesulitan beradaptasi dengan teknologi dan metode pengelolaan baru. Keterbatasan kompetensi tersebut mengurangi kemampuan institusi dalam memonitor kinerja, mengelola data, dan menjalankan evaluasi kebijakan. Beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah personel juga menghambat produktivitas aparatur. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur harus dilakukan melalui pendekatan terstruktur dan berbasis kebutuhan.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sampah masih belum diintegrasikan secara optimal ke dalam sistem tata kelola daerah. Banyak daerah belum memiliki mekanisme pelaporan berbasis data yang memungkinkan pengawasan publik secara memadai. Kurangnya transparansi menghambat proses evaluasi internal dan eksternal yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas kinerja aparatur. Selain itu, disparitas sistem informasi membuat kualitas data antar daerah tidak seragam, sehingga membatasi penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Minimnya

akuntabilitas juga membuka ruang bagi inefisiensi dan distorsi implementasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis data menjadi elemen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan.

Responsivitas pelayanan kebersihan menunjukkan peran penting inovasi digital dalam memperkuat kinerja pemerintahan daerah. Daerah yang telah mengadopsi sistem pelaporan daring dan aplikasi aduan masyarakat terbukti memiliki respons yang lebih cepat dan terukur. Efektivitas kanal digital ini memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Sebaliknya, daerah yang masih mengandalkan mekanisme manual cenderung mengalami keterlambatan dalam penanganan permasalahan lingkungan. Perbedaan ini mengonfirmasi bahwa inovasi teknologi merupakan variabel penting dalam memperbaiki kinerja sektor publik. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan menjadi strategi penting yang perlu diperluas secara nasional.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen fundamental dalam mencapai keberhasilan implementasi regulasi pengelolaan sampah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilahan, pengurangan, dan pengelolaan sampah terbukti memperkuat efektivitas program pemerintah daerah. Program seperti Bank Sampah menunjukkan bahwa model kolaboratif mampu mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan. Namun, rendahnya kesadaran di sejumlah daerah menunjukkan kebutuhan akan pendekatan edukatif yang lebih intensif dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan program partisipatif sangat dipengaruhi oleh konsistensi dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi penguatan partisipasi masyarakat harus dirancang sebagai bagian integral dari kebijakan daerah.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya celah riset yang perlu



ditindaklanjuti oleh penelitian berikutnya, terutama terkait pengembangan indikator kinerja kuantitatif yang lebih komprehensif. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek deskriptif, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan hubungan kausal antar variabel kebijakan. Kesenjangan teoretis ini membuka ruang bagi pengembangan model evaluasi yang lebih integratif, dengan memasukkan dimensi teknis, sosial, kelembagaan, dan perilaku. Selain itu, studi komparatif berbasis big data dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam menganalisis dinamika pengelolaan sampah antar daerah. Penguatan basis empiris melalui data berkualitas tinggi akan memperkaya literatur kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, riset lanjutan perlu diarahkan pada pengembangan metodologi evaluatif yang mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Bantuan tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya analisis dan memperdalam pembahasan penelitian. Penulis merasa bahwa kolaborasi ini menjadi dasar yang kuat bagi penyelesaian karya ilmiah ini. Tanpa dukungan tersebut, penelitian ini tidak akan mencapai bentuknya yang sekarang. Penulis sangat menghargai setiap kontribusi, baik yang bersifat akademis maupun administratif. Semua pihak yang terlibat memiliki peran signifikan dalam keberhasilan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada lembaga akademik dan institusi yang telah menyediakan akses terhadap berbagai sumber data dan referensi. Ketersediaan literatur dan dokumen resmi sangat membantu penulis dalam melakukan kajian mendalam. Pemanfaatan fasilitas tersebut memungkinkan penulis untuk membangun

argumen secara lebih komprehensif dan sistematis. Dukungan institusional ini menjadi bagian penting dari kredibilitas penelitian. Penulis menilai bahwa kontribusi tersebut mencerminkan komitmen lembaga dalam mendukung pengembangan pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, apresiasi yang besar layak diberikan kepada seluruh institusi terkait.

Penulis juga berterima kasih kepada para reviewer dan editor jurnal yang telah memberikan masukan konstruktif. Setiap komentar memberikan arah yang jelas bagi peningkatan kualitas artikel ini. Saran tersebut membantu penulis memperbaiki struktur, memperkaya analisis, dan memperjelas argumentasi ilmiah. Penulis meyakini bahwa proses review merupakan bagian penting dari penyempurnaan karya ilmiah. Perhatian dan kehati-hatian para reviewer menunjukkan komitmen terhadap standar akademik yang tinggi. Atas semua kontribusi tersebut, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selain itu, penulis menghargai dukungan rekan-rekan peneliti dan akademisi yang turut berdiskusi dan memberikan pandangan kritis. Interaksi ilmiah yang terjadi selama proses penelitian memberikan wawasan baru yang sangat berharga. Diskusi tersebut memperluas perspektif penulis dalam memahami isu pengelolaan lingkungan. Penulis percaya bahwa pertukaran gagasan menjadi elemen kunci dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Dukungan informal tersebut sering kali menjadi inspirasi yang membantu penyempurnaan penelitian. Oleh karena itu, bentuk apresiasi yang tulus diberikan kepada seluruh rekan yang telah berkontribusi.

Akhirnya, penulis menyampaikan penghargaan kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang memberikan dukungan moral sepanjang proses penulisan. Dorongan emosional dan motivasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menjaga konsistensi dan ketekunan. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan penelitian ini tidak terlepas



dari peran mereka. Kehadiran dukungan tersebut menjadi sumber kekuatan yang tidak tergantikan. Penulis berharap bahwa karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Dengan demikian, seluruh pihak yang telah mendukung berhak menerima apresiasi yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., & Daroini, A. (2025). Analisis peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara melalui pengembangan kompetensi, disiplin, dan etos kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung. *Otonomi*, 25(1), 130–140. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v25i1.7034>
- Ambarwati, K. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Anjasmary, N. M. M., & Nor'aini, N. (2023). Kinerja pegawai pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2163–2171. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1030>
- Aromi, Z., Putri, O. A., & Rahayu, R. (2024). Pengelolaan sampah plastik di kota-kota Indonesia: Tantangan lokal dan pendekatan partisipatif untuk solusi berkelanjutan bagi masyarakat. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains (ECOTAS)*, 5(2), 251–255. <https://doi.org/10.55448/5f7d0846>
- Aryana. (2023). *Implementasi kebijakan retribusi jasa umum pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang* (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji). <http://repositori.umrah.ac.id/5011/4/ARYA>
- <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v23i3.8313>
- NA_180563201123_Administrasi%20Negara_Full%20teks.pdf
- Bachri, I. F. (2023). *Implementasi program pengelolaan sampah dalam penanggulangan pencemaran lingkungan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Dayana, M. (2022). Kolaborasi stakeholders dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kampar. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(2). <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i2.7987>
- Gazalin, J., & Asiri, L. (2024). Best practice kinerja aparatur dalam mekanisme pengelolahan sampah di Kabupaten Buton. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i1.245>
- Hasriani, H. (2024). Implementasi good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Publisitas*, 10(2), 186–198. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441>
- Kembaren, A. A. A., & Ridwan, M. (2024). *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pengelolaan sampah*.
- KLHK. (2023). *Laporan kinerja 2023*. https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/LAPORAN_KINERJA_2023_PUSDATIN_e5f12e2673.pdf
- Lapkin Ditjen Bina Adwil Tahun 2022. (2022). https://drive.google.com/file/d/1cqRxoue3l2W3_1453chp-4LKjyflqp_q/preview
- Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Syahida, H. N., & Sitorus, C. (2024). *Sampah di Indonesia: Tantangan dan solusi menuju perubahan positif*.

- Ngabito, S. P., Sulila, I., & Aneta, Y. (2024). *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Bidang Kebersihan dalam penanganan sampah di Kota Gorontalo*.
- Novalita, P., Heriyanto, M., & Muchid, M. (2018). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 16(1), 450–455. <https://doi.org/10.46730/jiana.v16i1.6148>
- Novitasari, F., & Nurharjadmo, W. (2023). Implementasi strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo pada masa pandemi Covid-19.
- Public Opinion on the Performance of the Surakarta City Environmental Service. (2024). *Globalization and Foreign Affairs Journal*. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/view/11201>
- Putra, O. A., & Wediyanto, E. (2023). Pengaruh rewards and punishment terhadap kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Bengkulu. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 99–110. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.266>
- Rahmawati, J., Kurnianingsih, F., & Okparizan, O. (2023). PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) GANET OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 21(2), 101–110. <https://doi.org/10.46730/jiana.v21i2.8109>
- Rochaeni, A. (2023). Interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung.
- Simanjuntak, D. D. A. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan

sampah di Kota Bekasi (Studi kasus TPA Sumur Batu).

Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (19th ed.). Penerbit Alfabeta.

Toif Fadzoli, R., Subekti, R., & Waluyo, W. (2023). Dampak kebijakan pengelolaan sampah sebagai parameter kinerja pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 28–36. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.444>

Utama, M. A., & Andry, H. (2024). Pengelolaan sampah rumah tangga masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Utari, I. A. L. A., & Mulyanti, D. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tenaga kesehatan di rumah sakit: Tinjauan teoritis. *Jurnal Kesehatan Amanah*, 7(1), 51–60. <https://doi.org/10.57214/jka.v7i1.264>